JURNAL TEOLOGI PRAKTIKA
http://jurnalstttenggarong.ac.id/index.php/JTP
Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong
p-ISSN 2722-8916, e-ISSN 2722-8908
Edisi: Volume 7, Nomor 1, Juni 2026
halaman: 1-15

Solidaritas Gereja di Tengah Dinamika Politik: Membaca Gagasan Etis-Politis Dietrich Bonhoeffer dalam Konteks Politik Indonesia

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo
Mahasiswa Magister Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
rolintaneo0402@gmail.com

Abstract:
This paper is a contribution of thought for the church to actively engage in real theological endeavors in the context of a constantly changing society. The context referred to in this paper is the political situation, which is currently at a point of tension due to perceived policies that sacrifice the community. This awareness naturally arises from a rejection of the notion of "master morality," which has the potential to prioritize personal ego for personal gain. Therefore, the church must be present and involved in demonstrating its prophetic voice. One approach offered in this church's task is to propose the concept of "Becoming a Church for Others" as a direction for the church to determine its ministry position. To complete this paper, the author used qualitative research methods, specifically a literature study approach relevant to the topic discussed. Through the ideas that Bonhoeffer offers about the position of the state and the church, this article aims to emphasize that the church can be a counter-force to a state or government that acts tyrannically.

Keywords: Church, Politics, Dinamika Politik, Bonhoeffe

Abstrak:
Tulisan ini merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi gereja untuk terlibat aktif dalam upaya berteologi secara nyata dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Adapun konteks yang dimaksud dalam tulisan ini ialah keadaan politik yang sementara berada dalam titik tendensi karena dinilai ada kebijakan-kebijakan yang mengorbankan masyarakat. Tentu kesadaran ini lahir sebagai bentuk penolakan akan paham moralitas tuan yang berpotensi mengedepankan kekuatan ego pribadi mencapai keuntungan pribadi. Karena itu, gereja mesti hadir dan terlibat dalam menunjukkan suara profetisnya. Salah satu cara yang ditawarkan dalam tugas gereja ini ialah dengan mengusulkan konsep “Menjadi Gereja bagi Orang Lain” sebagai arah bagi gereja untuk menentukan posisi pelayanannya. Untuk bisa menyelesaikan tulisan ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya pendekatan studi pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui gagasan yang Bonhoeffer tawarkan tentang posisi negara dan gereja, maka tulisan ini hendak menegaskan bahwa gereja dapat menjadi kekuatan penanding bagi negara atau pemerintahan yang bertindak tirani.

Kata-Kata Kunci : Dinamika Politik, Gereja, Politik, Bonhoeffer

Article History

Submit:	Revised:	Published:
April 29, 2025	April 26, 2026	Mei 12, 2026

Pendahuluan

Realitas hidup bernegara, khususnya di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan sebuah keprihatinan. Untuk menggambarkan kondisi negara yang sementara mengalami

gonjang-ganjing politik maka sebagian masyarakat memberi label “Indonesia Gelap”. Bagi sebagian masyarakat, “Indonesia Gelap” lahir dari bentuk kekhawatiran mereka terhadap berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini masyarakat sebagai objek dari realisasi kebijakan pemerintah (Muzzaki, 2025).

Sebagai masyarakat, wajar jika kemudian kekhawatiran ini muncul karena dalam sistem suatu negara demokrasi seluruh proses atau regulasi yang berkembang di dalamnya harus sungguh-sungguh berkontribusi pada pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Atau istilah lazimnya yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Idealnya roda pemerintahan dan kekuasaan harus berjalan seperti ini, tetapi dalam praktik, kerap kali ditemukan kasus dimana terjadi penyelewengan kekuasaan yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan bersama.

Pengabaian terhadap kepentingan bersama ini bisa jadi ada karena seorang pemimpin melihat kekuasaan sebagai cara menuju sukses dan mencapai apa yang menjadi harapan pribadi dan kelompok. Moralitas Tuan kemudian menjadi pembakar semangat mencapai tujuan. Model moralitas ini yang juga diserukan oleh Friedrich Nietzsche. Ini yang patut diwaspadai.

Dalam hal ini, politik yang kerap dilihat sebagai jalan untuk membangun peradaban manusia yang bermartabat ternyata dinodai oleh tindakan serakah pemimpinnya yang punya kuasa. Dalam kondisi yang menggelisahkan ini, maka kehadiran gereja mestinya menjadi garam dan terang bagi konteks politik tirani yang sementara bergejolak. Sebagai bagian dari *polis,* penulis melihat bahwa kiprah gereja juga harus memberi warna pelayanan bagi konteks dimana gereja ada dan berkarya.

Kiprah gereja ini perlu diapresiasi tetapi dalam terang tulisan ini, akan ada bentuk evaluasi kritis akan sistem politik Indonesia sekarang, disertai dengan kolaborasi ide dari etika kehendak untuk berkuasa dan moralitas tuan menurut Friedrich Nietzsche. Evaluasi model politik kuasa ini akan diimbangi dengan peran serta gereja dalam menyatakan dirinya sebagai nabi masa kini, berdiri menyuarakan kebenaran dan keadilan tetapi serentak menebar cinta kasih bagi semesta. Untuk butir ini penulis akan menggunakan gagasan Dietrich Bonhoeffer yakni “Gereja bagi Orang Lain” dalam

memberi arah bagi gereja bermisi dan serentak menerangi jalannya kekuasaan dalam suatu wilayah.

Ini penting untuk dicermati karena menurut Bonhoeffer, sebagaimana yang dikutip oleh Clifford Green menegaskan bahwa manusia hidup dalam dimensi sosialitas. Dimensi sosialitas itu memperlihatkan adanya relasi yang mutualisme, antara pribadi dan komunitas. Artinya, manusia diciptakan untuk ada dalam sebuah komunitas dan sebaliknya, sebuah komunitas baru layak disebut komunitas apabila ada perkumpulan banyak orang, dan di dalamnya masing-masing saling membutuhkan dan melengkapi (Green, 1999, p. 117).

Lebih lanjut, Bonhoeffer hendak menunjukkan bahwa sebagai anggota komunitas, lebih-lebih sebagai bagian dari persekutuan umat Allah, masing-masing anggota tidak dapat meniadakan kehadiran yang lain. Sebagai komunitas bergereja, umat Allah dipanggil untuk saling menopang satu sama lain, termasuk di dalamnya memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk konteks sosial-politik yang berkembang. Hanya dalam perhatian penuh karena keterikatan relasi itu, gereja benar-benar bersolidaritas secara konkret dengan konteks yang ada, terlebih antara satu pribadi dan pribadi lainnya. Dalam konteks seperti inilah, maka bagi penulis kekuatan persepktif Bonhoeffer menjadi relavan untuk gereja-gereja di Indonesia hadir dan terlibat dalam menyikapi dinamika sosial-politik Indonesia.

Istilah politik tirani, kekuasaan digunakan oleh penulis secara bergantian sebagai bagian dari memperlihatkan kait-mengait dua istilah ini. Bagi penulis, kekuasaan itu dapat diraih karena adanya medan politik yang memberikan ruang bagi setiap orang berkompetisi dan mengembangkan daya kreatif dan potensial dalam dirinya. Pada akhirnya, dengan mengusung konsep “menjadi gereja bagi orang lain” diharapkan bisa menjadi kekayaan berteologi secara nyata dalam komunitas masyarakat dan gereja, dalam hal ini menjadi salah satu poin tawaran untuk gereja terus menggaungkan pelayanannya, khusus dalam memperlihatkan dimensi etis dari politik itu sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur

mengenai etika politik Bonhoeffer, etika kekuasaan, politik Indonesia, dan peran gereja. Hasil analisis kemudian disintesiskan secara sistematis untuk mengkaji relevansi pemikiran Bonhoeffer dalam konteks politik Indonesia.

Pembahasan

Memahami Makna Politik dan Tujuannya

Politik, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni *Polis* yang bermakna kota tetapi juga kerap disebut dengan negara kota. Di dalam *polis* itu bergabung banyak komunitas masyarakat. Karena itu, keberadaan *polis*, menurut Bagus Takmin sendiri bisa bermakna wadah yang baik bagi setiap orang bekerja mencapai tujuan kemanusiaan (Takwin, 2011, vii–viii). Dalam tataran ini, politik punya makna yang positif karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan segala daya-potensi yang ada dalam dirinya untuk tujuan-tujuan yang mulia.

Karena politik punya tujuan yang mulia, maka dalam perkembangan selanjutnya, politik selalu dikaitkan dengan upaya menyusun dan melaksanakan kebijakan. Proses ini merupakan wujud aktif melibatkan masyarakat melalui kehadiran mereka-mereka yang diberi tugas atau mandat khusus untuk terlihat dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya dalam suatu *polis*. Dalam taraf ini, politik juga bermakna suatu seni dalam menjalankan roda kepemimpinan yang ada. Dalam terang pemahaman ini, maka melalui proses pembuatan kebijakan dan realisasinya, maka politik dipandang sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dalam suatu wilayah (Hutahaean, 2021, p. 5). Pada tahapan ini, fungsi politik masih berjalan sesuai dengan koridornya.

Politik Tirani Merubah Marwah Politik Itu Sendiri: Konstruksi atas Teori Kehendak untuk Berkuasa dan Moralitas Tuan Friedrich Nietzsche

Di poin pertama telah diperlihatkan bahwa politik ada semata-mata untuk menata kehidupan suatu masyarakat. Tetapi politik juga bersentuhan dengan pengambilan kebijakan. Dalam tataran ini, politik bisa disalahartikan. Idealnya kebijakan yang diambil harus bisa menyejahterakan seluruh elemen masyarakat, tanpa tebang-pilih. Kendati demikian dalam praktiknya, kebijakan yang diambil kerap

menciderai idealisme politik itu sendiri. Kebijakan itu bisa pilih muka, berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam ranah ini, tidak heran jika kemudian muncul yang namanya politik balas jasa sebagai bagian dari melegitimasi dukungan dari pihak tertentu.

Fenomena ini yang kemudian disebut dengan politik kotor sebagai bagian dari melegalkan cara-cara yang kotor, licik, penuh kekerasan, bahkan balas dendam, tidak hanya kepada lawan politik tetapi juga sahabat dalam dunia politik itu sendiri. Dalam perkembangannya, politik telah dilihat sebagai medan subur meraup untung. Politik dilihat sebagai bisnis kelompok dan keluarga (Dwihantoro, 2013, p. 15). Bahaya dari bergulirnya politik model ini dapat melahirkan yang namanya politik dinasti dan politik identitas. Ini yang harus diantisipasi agar marwah politik itu tetap baik.

Politik model ini, diperingatkan juga oleh Friedrich Nietzsche. Memang tidak secara eksplisit Nietzsche memaparkan tentang politik tetapi bagi penulis dengan memberikan penggambaran tentang etika kehendak untuk berkuasa sudah cukup merepresentasikan politik kekuasaan yang penuh dengan tirani yang sekarang sementara menyeruak dalam konteks keindonesiaan.

Bagi Nietzsche, kehendak untuk berkuasa merupakan hakikat dari kehidupan manusia (Nietzsche, 2006, p. 52). Melalui kehendak untuk berkuasa, seseorang diarahkan untuk secara dominan memperlihatkan seluruh daya-potensi yang ada dalam dirinya. Tetapi ada satu catatan penting dibalik apa yang dikemukakan Nietzsche perihal kehendak untuk berkuasa yakni melepaskan semua tatanan nilai-doktrin yang selama ini memenjarakan manusia sehingga tidak bebas berbuat ini dan itu. Manusia harus menjadi tuan atas dirinya sendiri, tidak bisa ia dikekang oleh apapun itu, termasuk Tuhan (Munir, 2006, p. 315–16). Inilah yang dinamakan dengan konsep manusia unggul, manusia yang begitu percaya atas segala kemampuan dirinya.

Dalam terang pemahaman ini, Nietzsche sebagaimana yang diterangkan oleh Dionysius Cahyanto lantas tampil memproklamirkan suatu nilai atau moralitas baru yakni moralitas tuan. Moralitas tuan itu sifatnya universal, yang ditentukan melalui bagaimana seseorang harusnya berperilaku. Jadi, sesuatu dapat dikatakan baik atau jahatnya bukan dilihat dari apa yang dilakukan, melainkan kebaikan atau kejahatan ini

bergantung pada cara pandang yang bersangkutan terhadap sesuatu yang ia lakukan (Cahyanto, 2023, p. 85).

Bagi mereka yang memiliki moralitas tuan, ia akan diarahkan untuk mematikan berbagai bentuk otoritas dan nilai-nilai umum yang dianggap hanya akan mengungkung dirinya untuk tidak berkembang. Celakanya, moralitas ini bisa membawa seseorang terjebak dalam spirit egoisme. Aturan umum dilanggar, lalu ia menciptakan aturan individual, mengabaikan hakikat kebersamaan. Ia harus bisa berkembang dengan caranya, termasuk mengorbankan orang lain. Moralitas ini pada akhirnya punya konsekuensi menciptakan pertikaian pribadi dan kepentingan (Cahyanto, 2023, p. 88).

Pada poin perihal moralitas tuan ini, penulis perlu menegaskan bahwa Nietzsche tidak menawarkan paradigma ini secara kerdil dan dihidupi secara membabi buta. Sebaliknya, moralitas tuan harus dipahami sebagai cara melepaskan diri dari berbagai macam sikap fanatik yang memenjarakan manusia sehingga tidak berkembang. Jika dalam perjalannya, spirit moralitas tuan ini disalahpahami dalam arti digunakan sebagai alat membenarkan tindakan serakah dan tirani seorang pemimpin, maka harus jujur dikatakan bahwa tujuan itu telah keluar dari horizon dan konteks Nietzsche membicarakan makna moralitas tuan.

Dengan menekankan hal ini maka tidaklah berlebihan jika penulis berkesimpulan bahwa kehendak untuk berkuasa ini bisa menjadi juru mudik bagi seorang pemimpin yang kelihatan lalim, dikuasai naluri tirani dalam menjalankan roda kekuasaannya. Pada akhirnya, pola kehendak ini menitikberatkan pada diri sendiri. Bahkan, di taraf paling parah yakni ego pribadi menjadi instrumen dalam pengambilan suatu kebijakan. Dalam kaitan dengan teori kehendak untuk berkuasa yang Nietzsche serukan, kehendak itu harus murni untuk diri sendiri, jika perlu menjadi pesaing dengan sesama yang lain.

Bisa jadi bahwa demokrasi yang merupakan bentuk ideal pemerintahan dikesampingkan karena dalam kehendak untuk berkuasa sangat tidak dianjurkan untuk seseorang dikungkung oleh idealisme lain. Yang ada hanya dirinya dan apa yang harus dilakukan. Inilah yang dinamakan politik tirani, politik yang mematikan nurani dan mengedepankan kekuasaan pribadi.

Dalam sistem politik tirani, hak-hak rakyat diabaikan. Malah dalam hal tertentu rakyat menjadi korban atas kepemimpinan yang serakah. Dalam model politik ini telah terjadi pergeseran fundamental dimana harusnya politik itu adalah kerja bersama untuk membangun peradaban yang adil atau setara malah dalam perjalannya diganti dengan upaya memenuhi segudang kepentingan pribadi. Rakyat yang harusnya dilayani dengan setulus hati kini menjadi korban dari pemerintahnya sendiri (Ratnasyifa, 2024, p. 6).

Menanggapi fenomena yang terjadi maka paling tidak harus ada kekuatan penyeimbang yang dapat memberi masukan atau bahkan menjadi tandingan atas roda pemerintahan yang sementara dikuasai oleh politik tirani. Tetapi perlu dicatat bahwa kehadiran dari lembaga tandingan bukan untuk meruntuhkan membubarkan suatu negara tetapi lebih terarah kepada menyuarakan pesan pertobatan atas rezim yang berkuasa dengan sewenang-wenang. Untuk itu, keterlibatan atau kehadiran gereja di ruang publik menjadi penting di dalam menunjukkan keberpihakannya bagi masyarakat tertindas tetapi serentak menyampaikan pesan profetisnya agar ada pertobatan publik atas pemerintahan yang penuh dengan tirani. Untuk usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam poin-poin sesudah poin ini.

Keterlibatan Gereja dalam Ranah Politik

Pertama-tama perlu ditegaskan pada poin ini bahwa keterlibatan gereja dalam dunia politik bukan dalam arti terlibat secara politik praktis. Keterlibatan gereja dalam dunia politik harus dibaca dalam terang pemahaman bersama negara (atau para pemimpin) turut bekerja dalam memperjuangkan keadilan dan penyamarataan kesejahteraan. Ini berarti bahwa keterlibatan gereja disini berjalan lurus dengan makna politik sesungguhnya (Ciphardian, 2023, p. 14).

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi konkret dari keterlibatan gereja dalam dunia politik? Menjawab pertanyaan ini maka ada tiga dimensi politik yang menjadi perhatian gereja untuk terlibat di dunia politik, antaranya: pertama, politik kemanusiaan. Politik kemanusiaan ini dimaksudkan untuk mendorong warga gereja untuk terus lantang bersuara tentang menghargai harkat dan martabat manusia. Kedua, politik nilai. Dalam model keterlibatan ini umat dituntun untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur dari politik itu sendiri yakni penuh kejujuran, penuh integritas serta penuh

perhatian pada isu kemanusiaan. Ketiga, politik kebangsaan. Keterlibatan ini ditunjukkan oleh gereja yang tidak pernah jenuh-jenuh memerangi berbagai masalah kebangsaan yang ada seperti terorisme, radikalisme atau juga berhadapan dengan pemerintah yang menggunakan hak kuasanya secara sewenang-wenang (Ciphardian, 2023, p. 14).

Terhadap keterlibatan gereja dalam dunia politik maka secara ringkas bisa kita katakan bahwa gereja memang menjadi bagian dari suatu *polis*, tetapi tidak berarti bahwa karena gereja adalah bagian dari negara maka itu akan melumpuhkan suara kenabian gereja ketika berhadapan dengan model kepemimpinan tirani. Sebaliknya, dari keprihatinan atas politik tirani ini merangsang gereja untuk terus berdiri dan menyatakan kebenaran. Politik tirani adalah wajah iblis yang dapat melemahkan bahkan merubuhkan suatu negara. Politik tirani itu selalu muncul ketika kekuasaan itu dikendalikan oleh beberapa orang saja dengan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya (Yewangoe, 2017, p. 230).

Politik model ini harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan untuk ia terus hidup karena bahaya atau dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dengan bersuara lantang melawan tirani pemerintahan, paling tidak telah memperlihatkan esensi gereja sebagai nabi masa kini yang mau terus menyatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah.

Menimbang Ulang Pandangan Dietrich Bonhoeffer sebagai Tawaran bagi Gereja Berpolitik Etis dalam Konteks Politik Keindonesiaan

"Menjadi gereja bagi orang lain" merupakan sebuah gagasan yang coba penulis tawarkan sebagai bagian dari gereja tampil di depan publik dan dengan lantang terus bersuara tentang hak-hak hidup manusia, termasuk di dalamnya bersuara atas tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam menjalankan kekuasaan yang ada. Gagasan ini bukan suatu gagasan baru. Sebelumnya gagasan ini sudah disuarakan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog asal Jerman.

Guna memahami gagasan Bonhoeffer ini, perlu pula kita mencari tahu bagaimana ia memahami kehadiran negara dan pemerintah dalam realitas hidup bersama. Baginya, duduk dalam jabatan pemerintahan adalah sebuah jabatan ilahi. Ia merujuk pada Roma 13:4 yang menegaskan bahwa mereka yang ada dalam jabatan

pemerintahan adalah pelayan, hamba dan juga wakil Allah (Bonhoeffer, 1955, p. 334) . Ini berarti bahwa Bonhoeffer memahami bahwa jabatan sebagai seorang anggota dalam lingkaran pemerintahan adalah sebuah anugerah. Maka tanggung jawabnya melaksanakan tugas itu pun adalah tanggung jawab etis berdasarkan anuegrah itu.

Karena jabatan pemimpin merupakan anugerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, gereja, sebagaimana ditegaskan Bonhoeffer dalam kutipan A. A. Yewangoe, tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri, melainkan harus hadir dan berpihak kepada masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ketika pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya serta melakukan praktik ketidakadilan dan kekerasan.Gereja adalah persekutuan orang percaya. Sifatnya am atau mengakomodir kehadiran orang lain.

Dengan menunjukkan esensi ini tidaklah berlebihan. Mengapa demikian? “Menjadi gereja bagi orang lain” hadir sebagai refleksi iman atas kehadiran Yesus yang tidak untuk diriNya sendiri melainkan juga “menjadi manusia bagi orang lain”. Dengan kesadaran ini, maka gereja tampil untuk menyuarakan tentang kebaikan Allah atas semua orang, yang di dalamnya juga bersuara untuk pemegang kekuasaan bersikap adil dan penuh kasih sebagai aksi konkret dari menyatakan kebaikan Allah itu (Yewangoe, 2017, p. 54–55).

Tesis Bonhoeffer ini tidak hadir dalam ruang hampa. Sebaliknya, tesisnya ini lahir dari refleksi nyata atas pergulatannya sebagai seorang Abdi Allah dalam melawan rezim pemerintahan yang penuh dengan kesewenang-wenangan, dalam hal ini Adolf Hitler. Baginya, rezim NAZI yang berkuasa pada saat itu telah menjadi Anti Kristus dan musuh bagi yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Sekalipun harus di penjara, bahkan harus menghabiskan waktunya disana hingga kematian menjemput, ia tetap menjadi hamba yang setiawan, yang tetap berdiri di garis depan menyaksikan tentang Kristus. Keteladanan Bonhoeffer ini yang sekiranya harus menjadi alat rangsang bagi gereja untuk terus menyatakan apa yang benar, yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan (LAI, 2025).

Kesaksian Bonhoeffer ini juga sepenuhnya turut menjiwai pemikirannya tentang keterkaitan antara negara, pemerintah dan gereja. Sebagaimana yang dikutip oleh Brian Watson, Bonhoeffer menegaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan

yang menciptakan dan memelihara hukum dan keadilan yang dalam perkembangan selanjutnya memungkinkan semua lembaga dalam negara, baik itu keluarga, gereja dan lembaga lainnya yang ada bersaksi teguh tentang apa yang mereka imani, lebih-lebih tentang kesaksian menjadi murid Kristus (Watson, 2015, p. 49).

Kendati demikian, dalam perkembangan yang ada (masa Bonhoeffer) pemerintah telah bersikap anarki. Pemerintah tampil menjadi musuh kemanusiaan. Terhadap kondisi yang ada, Bonhoeffer sebagaimana yang dikutip Watson lagi-lagi menegaskan bahwa kehadiran dari gereja hendaknya melindungi para korban ketidakadilan pemerintah, bukan hanya bagi umat Kristen saja tetapi juga yang non Kristen (Watson, 2015, p. 41).

Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kuasa pedang yang ada di tangannya, bagi Bonhoeffer hanya bisa dilawan dengan sikap pemuridan yang benar. Perlawanan itu bukan dalam arti membalasan kekerasan dengan kekerasan, atau kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, gereja dipanggil untuk melawan tirani dengan sabar, dan menunjukkan sikap penuh kasih di hadapan kekerasan yang masif dilakukan. Maka bagi Bonhoeffer sebagaimana yang Haddon Willmer jelaskan di sinilah gereja memiliki kuasa yang lebih hebat dibandingkan negara di dalam memerangi kejahatan (Willmer, 1999, p. 185). Bonhoeffer dalam hal ini memperkenalkan politik damai dan penuh kasih di hadapan penguasa yang tiran.

Makna dari "menjadi gereja bagi orang lain" adalah sebuah refleksi kristiani yang mendalam akan kehadiran dan peran Kristus di dunia. Kata lainnya, gereja sementara meneladani karya Kristus untuk mewujudkan cinta kasih secara konkret bagi mereka yang selama ini mengalami ketidakadilan struktural dalam sebuah komunitas. "Menjadi gereja bagi orang lain" adalah sebuah bentuk solidaritas kristologis, yakni masing-masing umat beriman berpartisipasi dalam menanggung penderitaan orang lain, tetapi serentak meneladani karya Kristus. Maka, "menjadi gereja bagi orang lain" itu melampaui tuntutan moral-kemanusiaan (Lee, 2026, p. 190).

Dengan argumentasi ini, Bonhoeffer dalam hemat penulis telah dibawa ke suatu kesadaran tentang kasih tanpa sekat atau yang sifatnya universal. Gereja menghidupi kasih model ini sebagai bagian dari kesaksiannya tentang Kristus dalam konteks yang

sedang digumuli. Inilah suatu nilai moralitas kekristenan, yakni moralitas kasih yang mampu memberi arti bagi gereja dalam melaksanakan kesaksiannya, dalam hal ini konteks politik Indonesia.

Interpretasi terhadap Yeremia 29:7 & Roma 13:1-7 dalam Upaya Melihat Keterlibatan Gereja di Bidang Politik

Gereja dalam melaksanakan tugasnya pun harus ada landasan yang jelas. Rujukan teks Alkitab ini dimaksudkan untuk mengarahkan pelayanan gereja "yang membumi" dalam konteks dimana ia hadir dan bermisi. Karena itu 2 teks Alkitab ini diangkat untuk kemudian memberikan suatu landasan bagi gereja untuk turut terlibat dalam politik, tetapi dengan catatan bukan politik praktis tetapi keterlibatan dalam politik dalam aspek-aspek tertentu seperti pemerintahan yang semena-mena.

Dua teks ini kerap dilihat sebagai yang kental membicarakan politik. Pertama, dalam Yeremia 29:7 dengan perintah nabi tentang "mengusahakan kesejahteraan kota" ini sejalan dengan makna *polis*. Keberadaan Israel di pembuangan tetap diharapkan memberikan suatu kontribusi aktif bagi pemerataan kesejahteraan yang ada disana. Tetapi dalam terang tugas ini juga tersirat makna religius yakni giat berdoa sebagai bagian dari kesaksian nyata orang Israel di pembuangan. Kesaksian ini dalam hemat Wilhelm J. Wessels bisa melegitimasi kekuasaan Allah di negeri pembuangan (Wessels, 2016, p. 5).

Untuk teks kedua, Roma 13:1-7 lebih terfokus pada cara pandang terhadap pemerintah dari sisi positif yakni kehadiran pemerintah adalah bagian dari cara Allah menunjukkan karyaNya melalui upaya pemerintah di dalam mengatur sebuah *polis* sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kehadiran pemerintah pada hakikatnya adalah turut bersama menciptakan kesejahteraan umum maka ini dipandang baik dan karena itu harus didukung (Nole, 2023, p. 151).

Kendati kita perlu tunduk dan mengapresiasi pemerintah atas kerja kemanusiaannya tetapi perlu diingat bahwa rasa tunduk itu bukan dalam ketaatan yang mematikan nalar kritis ketika ada penyelewengan kekuasaan. Karena itu perlu kehati-hatian dalam menafsirkan konsep tunduk terhadap pemerintah. Pembacaan atas teks ini jangan ditafsir secara hurufiah. Penulis kemudian memahami bahwa "menjadi gereja

bagi orang lain " dari dua teks ini yakni gereja terus aktif untuk mengajak umat berjalan bergandengan tangan dengan pemerintah memperjuangkan pemerataan keadilan tetapi juga serentak tidak kompromi dengan kekuasaan yang penuh tirani.

Implementasi "Menjadi Gereja bagi Orang Lain" terhadap Karya Gereja di Bumi Indonesia

Tesis dari Bonhoeffer ini akan beririsan dengan apa yang menjadi konteks konkret dari kehadiran gereja. Ini adalah tawaran perspektif dan ajakan moral untuk gereja tak pernah patah semangat berdiri bersama mereka yang menjadi korban politik tirani. Dalam taraf tawaran dan ajakan ini maka salah satu hal yang bisa dilakukan untuk "menjadi gereja bagi orang lain" yakni terlibat bersama rakyat yang hari-hari ini dalam sirkulasi politik Indonesia memperlihatkan sebuah nada pesimis. Penulis kemudian mencoba mengartikulasikan panggilan "menjadi gereja bagi orang lain" dengan konsep *polis* dan *koinonia* yang Yosef Keladu Koten kemukakan dalam bukunya "Partisipasi Politik".

Baginya, *polis* itu berkaitan erat dengan dibukanya kesempatan bagi semua masyarakat yang ada di dalamnya untuk dapat hidup dan bergerak secara bebas, dalam hal ini mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan bersama. Dalam terang pemahaman ini, maka untuk menguji apakah sebuah *polis* itu berjalan ideal adalah dengan kembali melihat sejauh mana masyarakat yang ada di dalamnya mampu menggerakkan potensinya untuk mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan (Koten, 2010, p. 140–141).

Gereja dapat memanfaatkan ruang ini untuk kemudian memberikan sebuah catatan masukan yang amat berharga kepada pemerintah yang sedang berkuasa tentang apa yang telah dilakukannya selama ini apakah sudah melihat aspek pendayagunaan potensi masyarakat ataukah tidak. Jika dalam praktiknya pemerintah memainkan politik tirani maka gereja harus berdiri bersama mereka yang lemah dan tertindas untuk kemudian mendapatkan keadilan itu.

Dengan menjalankan visi "menjadi gereja bagi orang lain" maka disini gereja juga sementara memperlihatkan salah satu aspek keberadaannya yakni koinonia. Gereja adalah persekutuan. Dalam semangat koinonia itu, gereja terus bersuara tentang

pentingnya menjaga nilai persahabatan dan keadilan. Bagi Yosef Koten, persahabatan itu berkaitan dengan terbangunnya spirit kerja sama, dalam lingkaran kebersamaan. Sedangkan keadilan selalu bertalian dengan prinsip kesamarataan (Koten, 2010, p. 141–142).

Kesaksian untuk "menjadi gereja bagi orang lain" ini akan sungguh-sungguh hidup dan menghidupi suatu komunitas percaya dan masyarakat apabila semua elemen yang ada dalam Gereja sungguh-sungguh terpanggil untuk memberikan kesaksian konkretnya dalam menggumuli tantangan zaman yang sementara berlangsung termasuk pergumulan atas tipe kepemimpinan tirani yang mulai meluas dampaknya.

Pada taraf ini, gereja sebenarnya sedang "menjadi gereja bagi orang lain" yang memperlihatkan politik cinta kasih yang disuarakan oleh Paus Fransiskus. Bagi Paus Fransiskus dengan mengembangkan politik cinta kasih, setiap orang, termasuk gereja dan pemerintah terpanggil untuk mengembangkan semangat solidaritas sosial yang mengalahkan ego pribadi dan sektoral. Dalam politik cinta kasih itu juga, semua terpanggil untuk mencintai kesejahteraan umum yang di dalamnya ada komitmen untuk hidup dalam kebahagiaan kolektif. Dalam semangat cinta kasih ini juga maka gereja telah tiba pada suatu kesadaran bersama untuk menghargai dan menerima sesama yang paling rentan menjadi korban pemerintah yang penuh tirani (Harun (Penerjemah), 2020, p. 112 & 115).

"Menjadi gereja bagi orang lain" dengan sendirinya bermakna kehadiran gereja menjadi sahabat umat dalam ruang publik Indonesia. Di samping itu, dengan menawarkan paradigma ini, setidaknya panggilan gereja dan pemimpin di negeri ini diperluas, yakni bagaimana kehadirannya memberikan sumbangan positif bagi terciptanya keadilan bersama. Melalui realisasi tugas ini, kemudian menunjukkan bahwa basis pelayanan gereja dan pemerintah sebenarnya ada pada pelayanan penuh empati di ruang publik (Taneo & Sonlay, 2025, p. 131).

Dengan mengusung konsep "menjadi gereja bagi orang lain" untuk menitikberatkan pada spirit pelayanan gereja dalam dunia tidak harus dipahami sebagai bentuk perlawanan secara ekstrem kepada negara dan pemerintah. Bagi Bonhoeffer, kehadiran gereja sudah semestinya memberikan sebuah seruan kepada pemimpin untuk benar-benar bertanggung jawab atas tugas yang ia emban, sebab tugas itu bersifat ilahi

karena bersumber dari Allah. Maka, di sini, gereja sementara menuntun mereka yang mengemban tugas sebagai bagian dari pemerintahan untuk memahami panggilannya secara benar (Bonhoeffer, 1955, p. 342).

Pada akhirnya, dengan jalan politik ini gereja kembali pada spirit memanusiakan manusia berdasarkan konsep “menjadi gereja bagi orang lain”. Tidak bisa diingkari pelayanan model ini jika bukan gereja yang berdiri bersama kaum rentan, dan yang bersuara lantang atas kepemimpinan yang tirani maka siapa lagi yang akan bersuara tentang ini? Kiranya ini menjadi pertanyaan reflektif bagi gereja dalam memantapkan panggilan dan misinya.

Kesimpulan

Politik sesungguhnya memiliki tujuan yang baik demi misi kemanusiaan. Di dalam dunia politik seluruh potensi masyarakat diberdayakan. Masyarakat satu sama lain bekerja bersama dalam menata kehidupan menuju sejahtera. Kendati demikian, politik sebagai alat mencapai kekuasaan juga dalam dirinya bisa berpotensi merusak tatanan masyarakat yang sudah baik menjadi rusak. Hal ini terjadi karena ada tunggangan kepentingan lain dalam diri pemimpin. Kepentingan ini yang kemudian dibawa ke ranah pembuatan kebijakan dan realisasinya di lapangan. Kerap kepentingan yang ada membuat para pemimpin gelap mata terhadap kekuasaan. Kebijakan yang diambil itu menjadi alat penindasan. Dalam bahaya karena penyelewengan kekuasaan ini gereja harus ada untuk menyerukan tentang pentingnya pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana pesan Sila Kelima. Karena itu, konsep "menjadi gereja bagi orang lain" mengandung pesan solidaritas bagi gereja untuk terus berasa bersama masyarakat yang rentan dan korban kesalahan pengambilan kebijakan. Gambaran tentang kondisi ini yang harus kemudian gereja kawal di tengah bergulirnya roda pemerintah yang baru. Memang benar bahwa pemerintah juga adalah utusan Allah di bumi, yang menjadi mitra gereja dalam kerja kemanusiaan tetapi pemerintah juga bisa keliru dalam implementasi kebijakan dan itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi gereja untuk melihat hal-hal yang salah dari kebijakan negara dan kemudian bersuara untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Daftar Rujukan

Bonhoeffer, D. (1955). *Ethics (Translated by Neville Horton Smith)*. Macmillan Publishing Company.

Cahyanto, D. W. (2023). Moralitas Menurut Friedrich Nietzsche: Eksplorasi "Mentalitas Budak." *Prosiding Seminar Nasional Filsafat Dan Teologi, Universitas Sanata Dharma*, *1*(2), 85.

Ciphardian, V. Y. (2023). *Modul Pendidikan Politik*. Komisi Orang Muda Katolik Keuskupan Surabaya.

Dwihantoro, P. (2013). Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik. *POLITIKA*, *4*(2), 15.

Green, C. (1999). Human Sociality and Christian Community. In *John W. De Gruchy (Edited), The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*. Cambridge University Press.

Harun (Penerjemah), M. (2020). *FRATELLI TUTTI : Saudara Sekalian*. Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.

Hutahaean, H. (2021). Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres. *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*, *1*(1), 5.

Koten, Y. K. (2010). *Partisipasi Politik*. Penerbit Ledalero.

LAI. (2025, March 20). *Dietrich Bonhoeffer: Anugerah Kristus Tidak Pernah Murahan!* https://alkitab.or.id/berita/1584-Dietrich-Bonhoeffer:-Anugerah-Kristus-Tidak-Pernah-Murahan

Lee, S. (2026). Beyond Truth: A Politics of Reality in Arendt and Bonhoeffer. *The Review of Politics*, *88*(2), 190. https://doi.org/10.1017/S0034670526100564

Munir, M. (2006). Voluntarisme (Filsafat Kehendak) dalam Filsafat Barat. *Jurnal Filsafat*, *16*(3), 315–316.

Muzzaki, M. R. (2025, March 19). *Tagar Indonesia Gelap Dapat 81 Persen Sentimen Negatif*. https://www.tempo.co/politik/tagar-indonesia-gelap-dapat-81-persen-sentimen-negatif-1221552

Nietzsche, F. (2006). *On the Genealogy of Morality*. Cambridge University Press.

Nole, O. A. (2023). Hubungan Umat dan Pemerintah: Studi Hermeneutik terhadap Roma 13:1-7. *HUPĒRETĒS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *4*(2), 151.

Ratnasyifa, O. R. (2024). Konstitusi Pemisahan Kekuasaan menurut Polybius. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *1*(2), 6.

Takwin, B. (2011). *Etika Politik: Menimbang Ulang Politik*. TINTA Creative Production.

Taneo, R. F. S., & Sonlay, V. J. (2025). Relevansi Ajaran Paus Fransiskus Tentang Kepemimpinan Politik Dalam Konteks Keindonesiaan. *MELO: Jurnal Studi Agama-agama*, *5*(2), 131. https://doi.org/10.34307/mjsaa.v5i2.194

Watson, B. K. (2015). *The Political Theology of Dietrich Bonhoeffer and the Ethical Problem of Tyrannicide*. Louisiana State University.

Wessels, W. J. (2016). Patience, presence and promise: A study of prophetic realism in Jeremiah 29:4–7. *Verbum et Ecclesia*, *37*(1), 5.

Willmer, H. (1999). Costly Discipleship. In *John W. De Gruchy (Edited), The Cambridge Companion To Dietrich Bonhoeffer*. Cambridge University Press.

Yewangoe, A. A. (2017). *Hidup dari Pengharapan*. BPK. Gunung Mulia.